



## Hubungan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Peningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kabupaten Indramayu

Abdur Rahim<sup>1</sup>, Wardah Jaziroh<sup>2</sup>, Syifa Pujiah<sup>3</sup>, Nerman<sup>4</sup>, Warsudi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia

E-mail: [rahim@iai-alzaytun.ac.id](mailto:rahim@iai-alzaytun.ac.id), [wardahjaziroh@gmail.com](mailto:wardahjaziroh@gmail.com), [syifa.pjh16@gmail.com](mailto:syifa.pjh16@gmail.com), [nerman@gmail.com](mailto:nerman@gmail.com), [warsudi@gmail.com](mailto:warsudi@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-02-26 Revised: 2023-03-13 Published: 2023-04-01	Among the benchmarks for the development of a region in Indonesia is through APBD funds. Indramayu as one of the regencies in West Java province has the second largest APBD fund in Indonesia. However, the amount of the APBD is very unequal when compared to the lives of the majority of the people living below the poverty line. Apart from that, Indramayu's APBD funds are the "backbone" of the people's lives, this can be seen from the market activity which began to get busy when the APBD was able to be disbursed. This study tries to review in a succinct manner which is used as a conceptual framework in looking at the influence of district budget funds on improving facilities and infrastructure, as well as their influence on increasing the economic standard of the people who live within them.
<b>Keywords:</b> <i>Influence; APBD Relationship; People's Standard of Living.</i>	
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-02-26 Direvisi: 2023-03-13 Dipublikasi: 2023-04-01	Diantara tolak ukur pengembangan suatu daerah di Indonesia adalah melalui dana APBD. Indramayu sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat memiliki dana APBD terbesar kedua di Indonesia. Akan tetapi, besarnya APBD tersebut sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakatnya yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, dana APBD Indramayu menjadi "tulang punggung" kehidupan rakyatnya, hal tersebut terlihat dari aktivitas pasar yang mulai ramai saat APBD sudah mulai dapat dicairkan. Kajian ini coba mengulas secara rintis yang dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam melihat pengaruh dana APBD kabupaten terhadap peningkatan sarana dan prasarana, juga pengaruhnya terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang hidup di dalamnya.
<b>Kata kunci:</b> <i>Pengaruh; Hubungan APBD; Taraf Hidup Masyarakat.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan dan pembangunan. Ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, antara lain: sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana daerah. Dari beberapa aspek yang ada, aspek terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek keuangan, karena keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dibidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dimana daerah dapat diukur sejauh

mana daerah tersebut mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang seminim mungkin.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan adanya berbagai perubahan dasar hukum yang melandasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Dimulai dengan 2 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan perkembangan yang semakin pesat dan meningkatnya kompleksitas permasalahan serta kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah pusat untuk membenahi sistem yang ada melalui perubahan undang-undang yang menjadi dasar dari pelaksanaan

otonomi daerah tersebut dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dan permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu pemerintah pusat menetapkan undang-undang terbaru yang mengatur tentang Pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui kembali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan perubahan-perubahan tersebut telah membuktikan bahwa pembenahan sistem pemerintahan daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu daerah di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian Timur kabupaten indramayu dan wilayah kepulauan dengan luas 2.090,00 km<sup>2</sup>. Penghasilan terbesar kabupaten Indramayu adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. APBD Kabupaten Indramayu tahun 2012 adalah sebesar Rp. 4.061 Trilyun bersumber setelah adanya penyertaan modal sebesar Rp. 320 Milyar, sebelumnya hanya Rp. 3.376 Milyar. Kenaikan terjadi sekitar Rp. 917,5 Milyar dan berdampak pada perubahan APBD Kabupaten Indramayu tahun 2012 dari Rp 4 Milyar pada APBD murni menjadi Rp. 5,1 Milyar setelah perubahan dan termasuk SILFA. Secara garis besar, rincian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indramayu tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 3.271.263.535.000 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 235.120.650.000, Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.994.142.885.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 42.000.000.000.

Belanja sebesar Rp. 4.766.263.535.000 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.509.386.933.132, dan juga Belanja Langsung sebesar Rp. 3.256.876601.867. Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas, seperti Jamkesmasda, UED-SP, ADD, Inbup PPIP, Inbup Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan/Kelurahan dan Kegiatan "multi years". Selain itu juga dialokasikan untuk subsidi tarif untuk Penyediaan Air Bersih (PDAM), hibah uang dan barang serta bantuan sosial bagi kelompok masyarakat. Selanjutnya, pembiayaan terbagi menjadi dua, Pertama, penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000 yang terdiri dari SILFA tahun sebelumnya diprediksi Rp. 1.100.000.000.000 dan juga penerimaan dana

cadangan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pada multi years sebesar Rp. 400.000.000.000. Kedua, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000, digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM dengan besarnya APBD Kabupaten Indramayu.

Dengan dana APBD yang sedemikian besar, timbul pertanyaan, adakah APBD kabupaten Indramayu telah berperan secara maksimal dalam pembangunan kabupaten khususnya menaikkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan APBD Indramayu yang sedemikian besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia belum sebanding dengan keadaan masyarakat yang hidup di kabupaten tersebut, di mana masih banyak didapati masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari 489 ribu lebih penduduk kabupaten Indramayu, penduduk miskin mencapai 35.666 jiwa atau sekitar 7,3 persen dari jumlah penduduk yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyelidik berminat untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh dana APBD Indramayu terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di kabupaten tersebut yang dirangkai dalam bentuk kerangka konseptual dengan tema penelitian "Pengaruh Hubungan Pemerintah Daerah Terkait Optimalisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kabupaten Indramayu". Berkaitan dengan persoalan kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalami hal yang sama dimana pendapatan asli daerah masih lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan dari dana perimbangan. Hal tersebut dapat dilihat dari Data Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2014-2018 yang bersumber dari data Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan.

## II. METODE PENELITIAN

Walaupun kaedah penelitian akan dibahas secara lebih mendalam dalam bab tiga, namun penyelidik coba memperkenalkan sekilas tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode kajian tersebut meliputi metode kajian teoretikal dan empirikal (Narbuko, 2012).

### 1. Metode Kajian Teoritikal

Metode ini terdiri dari dua kaedah; kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisaan data. Pengumpulan data dilakukan melalui

metode kepustakaan. Untuk mendapatkan maklumat tentang definisi dan pengertian seputar kajian, penyelidik merujuk kepada beberapa sumber seperti buku-buku yang telah diterbitkan dan beberapa artikel. Adapun untuk mengetahui peningkatan taraf hidup sebuah masyarakat, penyelidik merujuk kepada makalah-makalah dan tulisan ilmiah yang telah dibentangkan, beberapa artikel dan juga internet bagi mendapatkan isu terkini. Kaedah pengumpulan data dalam kajian teoretikal ini dilakukan untuk memahami konsep anggaran APBD dalam meningkatkan taraf hidup sekelompok masyarakat. Hal ini dijalankan untuk menghindari salah faham pembaca dalam memahami judul berkenaan di samping memberikan kejelasan mengenai pengaruh APBD dalam meningkatkan sesuatu bidang dapat dimengerti. Analisis data dalam kajian teoretikal akan menggunakan metode deskriptif. Ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara keseluruhan data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diberikan kesimpulan.

## 2. Metode Kajian Empirikal

Metode kajian empirikal digunakan untuk melihat kenyataan pengaruh APBD Indramayu dalam membangun sarana dan prasarana daerah serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di kabupaten Indramayu. Pengumpulan data dalam kajian praktikal ini diperoleh dari maklumat tentang realita di lapangan bahwa APBD Indramayu mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan daerah Indramayu. Adapun penganalisaan pada data dalam kajian empirikal ini akan menggunakan metode deskriptif dan metode komparatif. Metode deskriptif dilakukan untuk menggambarkan keadaan sebenar yang ada di lapangan, sementara metode komparatif digunakan untuk dapat membandingkan ketergantungan masing-masing kecamatan di kabupaten Indramayu terhadap dana APBD dan kelangsungan pembangunan di wilayah-wilayah berkenaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hingga saat ini, mayoritas masyarakat kab. Indramayu hidup bergantung kepada dana APBD Kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas pasar yang berada di wilayah kabupaten Indramayu sebagai buruh tani. Perekonomian pasar pun untuk beberapa wilayah di kabupaten

Indramayu lebih pesat pada saat anggaran APBD mulai terlaksana, aktivitas gerobak pengangkut material sibuk hilir mudik, toko buku mulai membuat ready stok untuk persiapan kertas, dan penumpukan material mulai sibuk dengan stok materialnya. Menunjukkan bahwa dana perimbangan (transfer pusat) dari tahun 2014-2018 masih mendominasi terhadap penerimaan daerah bila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Indramayu terlihat sangat kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pemberian pemerintah pusat dan provinsi dengan proporsi yang paling banyak.

Kemudian bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dinilai masih kecil dilihat dari rata-rata PAD selama lima tahun yang hanya mencapai 13,23%. Meskipun demikian, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu selalu mengalami peningkatan terutama pada tahun 2014-2017 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu selalu mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun 2014-2017, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2018. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan PAD terbesar dari tahun 2014-2018 terjadi pada tahun 2014 dan 2017 dimana pada tahun 2014 terdapat peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 87,80% dari total PAD pada tahun 2013 senilai 174.713.400.274 telah menjadi 328.116.166.964 dimana terdapat pertumbuhan sebesar 153.402.766.690, dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 64,47% dari total PAD pada tahun 2016 senilai 351.177.413.767 menjadi 577.594.379.049. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -27,30% dari total PAD pada tahun 2017 senilai 577.594.379.049 telah menjadi 419.892.815.093 sedangkan pertumbuhan PAD paling kecil yaitu terjadi pada tahun 2016 dimana pertumbuhan PAD Kab. Indramayu hanya mencapai 1,24%.

Kontribusi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Indramayu selama lima tahun dinilai masih kecil dengan rata-rata kontribusi pajak sebesar 22,82% dan kontribusi retribusi sebesar 6,19%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah masih belum optimal dalam menggali potensi yang ada di daerahnya terutama dalam hal pajak

dan retribusi. Dari data yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemandirian keuangan daerah Indramayu disebabkan karena kurangnya kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah yang mana pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kab. Indramayu mendelegasikan tugasnya kepada Badan Keuangan Daerah selaku instansi yang bertugas untuk mengelola keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah di kabupaten Indramayu.

Sebagai catatan bahwa di beberapa wilayah di kabupaten Indramayu, realisasi APBD Kabupaten tidak terlalu berpengaruh kepada kehidupan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi di wilayah tersebut mampu untuk dapat mengolah sumberdaya alamnya secara baik yang juga berdampak kepada peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Peningkatan dan pengembangan suatu daerah bergantung kepada tinggi dan rendahnya dana APBD pada setiap tahunnya. Selain itu, manajemen pengelolaan dana daerah yang baik menjadi tolak ukur berhasil dan tidaknya daerah tersebut dalam membangun sarana dan prasarana serta meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan khususnya peningkatan taraf ekonomi. Secara nasional, dana APBD Indramayu adalah kedua tertinggi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Namun demikian, survei awal membuktikan bahwa dana APBD Indramayu yang demikian tinggi secara realita di lapangan tidaklah sesuai, karena masih banyak didapati masyarakatnya yang hidup pada garis ekonomi „menengah ke bawah“. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang peranan dana APBD Indramayu dalam meningkatkan sarana dan juga prasarana di kabupaten Indramayu, serta yang lebih penting lagi adalah membuktikan secara lapangan tentang pengaruh dana APBD Indramayu dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang hidup di kabupaten tersebut.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Hubungan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Peningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Dr. Samsubar Saleh, M. (2003). Implementasi performance budgeting pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Indramayu.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara
- Rencana Kerja BKD 2020*. (2020). Retrieved from Kabupaten Indramayu.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah